

## TANGGAPAN GENERASI MUDA PEMILIH PEMULA YOGYAKARTA TERHADAP PEMILU 2014

H. Purwanta

### A. Pendahuluan

Berbeda dengan periode pertama (2004 – 2009) yang oleh masyarakat dipandang cukup berhasil, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang ke dua (2009 – 2014) memperoleh banyak kritik. Salah satu kritik yang muncul adalah tanggapan terhadap rilis hasil penelitian *Fund for Peace* yang menempatkan Indonesia pada urutan 63 dari 178 daftar negara-negara gagal (*failed states*). Azyumardi Azra menyatakan bahwa urutan 63 menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara gagal. Posisinya lebih tepat dinyatakan sebagai dalam lampu kuning atau warning (*Republika*, 5 Juli 2012). Kritik tidak hanya berupa artikel atau opini yang dimuat di surat kabar, tetapi tidak sedikit yang ditulis dalam bentuk buku.

Posisi “warning” menunjukkan bahwa pemerintahan periode ke dua Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak hanya gagal membawa Indonesia ke kemajuan, tetapi sebaliknya dalam banyak hal mengalami kemunduran. Korupsi menjadi semakin mengemuka dengan munculnya banyak kasus yang terungkap dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Kekerasan juga tidak ketinggalan banyak mewarnai surat kabar-surat kabar Indonesia, baik berbasis keyakinan agama maupun suku/etnik.

Di latar belakang oleh berbagai peristiwa nasional yang memprihatinkan, Pemilihan Umum (PEMILU) yang diselenggarakan pada tahun 2014, yaitu Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 menjadi tonggak penting perkembangan demokrasi Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia PEMILU seringkali disebut sebagai masa pesta demokrasi, yaitu rakyat menentukan pilihan para pemimpin mereka, baik tingkat nasional maupun lokal, untuk periode lima tahun ke depan. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah masyarakat memandang PEMILU 2014 masih sebagai salah satu jalan terbaik untuk membangun Indonesia menjadi maju? Pandangan itu terkait dengan pengalaman PEMILU yang telah dilaksanakan sepanjang masa reformasi kurang mampu melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas. Bahkan partai politik yang lahir dan menjadi peserta PEMILU pun lebih banyak menampilkan

diri sebagai sekedar kendaraan menuju kekuasaan dari pada manifestasi ideologis dalam rangka memajukan masyarakat Indonesia.

Tulisan ini mencoba mengkaji Pemilu 2014 dari dua permasalahan utama, yaitu pandangan generasi muda pemilih pemula Yogyakarta terhadap kualitas proses dan hasil Pemilu 2009 dan partisipasi mereka dalam Pemilu 2014. Permasalahan pertama mencoba mendalami persepsi generasi muda Yogyakarta terhadap kualitas Pemilu tahun 2009 khususnya dan demokrasi Indonesia pada umumnya. Di pihak lain, permasalahan ke dua mencoba mendalami sejauh mana partisipasi mereka terhadap proses dan hasil Pemilu 2014.

Pengumpulan sumber dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa semester 2 dan 4 Universitas Sanata Dharma dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dari 500 eksemplar kuesioner yang disebarakan, setelah diseleksi, akhirnya diperoleh 475 eksemplar yang dijadikan data.<sup>1</sup> Berdasar data yang terkumpul, istilah generasi muda Yogyakarta yang dimaksud dalam kajian ini adalah mahasiswa dari kedua lembaga pendidikan tinggi tersebut.

## B. Persaingan Sehat

Indonesia sebagai salah satu masyarakat non Barat yang mengadopsi sistem politik demokrasi mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dicermati. Pengadopsian itu menjadikan masyarakat Indonesia terus menerus melakukan adaptasi dengan berbagai nilai yang mendasari sistem demokrasi. Untuk mengukur seberapa jauh perjalanan yang telah dilalui, paling tidak ada tiga aspek yang sangat menentukan kualitas demokrasi. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warga negara dalam politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Ketiga aspek itu secara simultan menjadikan demokrasi dipahami sebagai jalan terbaik menuju terbentuknya kesejahteraan sosial.

Persaingan yang sehat menjadi kriteria pertama kualitas demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa hal itu akan menjadi sistem seleksi yang hebat untuk memilih pemimpin terbaik:

*The other method of social control is continuous political competition among individuals, parties, or both. Elections and political competition do not make for government by majorities in any very significant way, but they vastly increase the size, number, and*

---

<sup>1</sup> Seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan jawaban dan keikutsertaan menjadi pemilih.

*variety of minorities whose preferences must be taken into account by leaders in making policy choices* (Dahl, 2006: 132).

Dari kutipan di atas, Dahl menempatkan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi sarana untuk menyeleksi tokoh dan partai politik yang kredibel dan berkomitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Apabila tokoh atau partai politik dipandang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, dia akan tidak dipilih dalam Pemilu dan akan kalah dalam persaingan. Dari sudut pandang ini, rakyat pemilih memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang akan diberi kekuasaan mengelola negara bangsa. Kekuatan besar rakyat dalam Pemilu akan mampu direpresentasikan dalam bentuk memilih apabila mereka memiliki kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengeluarkan pendapat (Dahl, 2006: 59).

Karakteristik yang dikemukakan Dahl tersebut, kiranya dapat digunakan untuk melihat perjalanan demokrasi di Indonesia yang dewasa ini sedang dalam proses mencari formasi terbaiknya. Dalam pandangan generasi muda yang menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2014, persaingan bebas telah terjadi pada Pemilu tahun 2009, baik antar individu maupun partai politik. Persaingan itu berlangsung sangat sportif dan sehat.<sup>2</sup> Pandangan itu merupakan modal yang sangat berharga untuk mengharapkan peran generasi muda pada pengembangan demokrasi Indonesia ke depan. Pandangan positif terhadap dinamika demokrasi Indonesia itu menjadikan generasi muda tidak lagi memandang dunia politik sebagai dunia yang kotor seperti pernah ternarasikan secara kuat pada masa lampau.

... rezim otoriter yang panjang di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto menutup kesempatan bagi bangsa kita untuk membesarkan partai-partai sebagai aset demokrasi. Sebaliknya, partai-partai dipandang sebagai sumber konflik dan instabilitas politik yang merintangangi "revolusi yang belum selesai" pada era Soekarno, dan "menghambat pembangunan" pada era Soeharto. Tidak mengherankan jika yang terbentuk kemudian adalah stigma bahwa partai-partai dan politisi sipil adalah bagian dari masa lalu yang buruk, dan lebih jauh lagi stigma bahwa seolah-olah politik itu "kotor" (Syamsuddin Haris, 2006: 69).

Permasalahan yang menarik adalah bahwa persaingan sehat dalam Pemilu tidak serta merta menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dan kinerja baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam pandangan generasi muda Yogyakarta,

---

<sup>2</sup> Persaingan pada Pemilu legislatif berlangsung sehat: 89,41%, persaingan pada Pemilu Presiden berlangsung sehat: 93,18%. Prosentase diperoleh dengan menggabungkan responden yang menjawab setuju sampai sangat setuju. Perlakuan yang sama juga dilakukan untuk item pertanyaan lain.

pemerintahan periode ke 2 Presiden Susilo Bambang Yudoyono gagal mengembangkan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Selain itu, pemerintah juga dipandang abai dalam menjaga persatuan Indonesia,<sup>4</sup> antara lain tampak pada gagalnya melakukan rekonsiliasi nasional terhadap korban kekerasan HAM di masa lampau.<sup>5</sup> Bahkan cita-cita bangsa Indonesia yang paling konkrit dan sempit pun gagal diwujudkan.<sup>6</sup>

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penggunaan sistem politik demokrasi di Indonesia tidak serta merta menghasilkan peningkatan kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama negara-negara non Barat, adalah besarnya prosentase sisi gelap dibandingkan sisi terang demokrasi. Kajian teoritis tentang sisi gelap demokrasi, salah satunya adalah pemikiran Sorenson yang menengarai bahwa sistem demokrasi telah berkembang dengan sangat beragam dan bahkan beberapa diantaranya justru menyimpang dari esensi:

*The spread of democracy since the end of the cold war has multiplied the variety of more or less democratic systems. This in turn has stimulated a veritable cottage industry of concepts—attempts to produce labels and categories that indicate political systems that have some, but frequently not all and often merely a few, democratic qualities. In other words, the three categories devised by Freedom House (free, partly free, not free) are considered insufficient for describing the current variation in political systems that are more or less democratic. The new concepts are especially directed at countries with some, but far from all, of the characteristics of a political democracy; hence the terms: elite-dominated, frozen, restricted, illiberal, pseudo, hybrid, or electoral democracies... (Sorensen, 2008: 22)*

Dari konsep-konsep baru yang dimunculkan oleh Sorensen pada kutipan di atas, salah satu yang menarik para pemerhati sistem demokrasi di Indonesia<sup>7</sup> adalah demokrasi beku (*frozen democracy*). Demokrasi beku adalah penamaan terhadap proses demokrasi yang mengalami pembusukan karena ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa melakukan perubahan sosial,

---

<sup>3</sup> Pemerintah periode 2009 – 2014 gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat: 73.41%.

<sup>4</sup> Kehidupan rakyat pada periode 2009 – 2014 menunjukkan semakin pudarnya nilai persatuan Indonesia dari Pancasila: 71.06%.

<sup>5</sup> Pemerintah periode 2009 – 2014 gagal melakukan rekonsiliasi nasional, terutama terhadap korban kekerasan tahun 1965 dan Tanjung Priok: 71.76%

<sup>6</sup> Kehidupan rakyat pada periode 2009 – 2014 menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan nilai keadilan sosial dari Pancasila: 69.65%

<sup>7</sup> Salah satu kajian tentang demokrasi beku di Indonesia adalah tulisan Adi Surya, “Memperkuat Demokrasi di tengah problem kebangsaan” yang terdapat pada <http://gmni-sumedang.blogspot.com/2011/05/memperkuat-demokrasi-di-tengah-problem.html>

politik, dan ekonomi yang mendasar, terutama yang menyangkut kepentingan dan perbaikan nasib masyarakat. Markoff (2002) menyusun empat kriteria tentang demokrasi beku, yaitu (1) kondisi perekonomian tidak mengalami kemajuan signifikan; (2) kegagalan dalam membangun masyarakat sipil; (3) konsolidasi sosial politik yang tak pernah berhasil; dan (4) penyelesaian tragedi sosial, politik, dan hukum dari masa lalu yang tidak pernah tuntas.

### C. Partisipasi Politik

Pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi mengalami dinamika yang menarik untuk dicermati. Pada masa Perang Dunia II dan dasawarsa setelahnya, kecenderungan yang muncul adalah pemikiran tentang pembatasan partisipasi masyarakat hanya pada pemilihan umum atau pemilu. Pemikiran itu antara lain dikemukakan oleh Schumpeter dan Dahl. Schumpeter (1942: 269) menjelaskan:

*It will be remembered that our chief troubles about the classical theory centered in the proposition that “the people” hold a definite and rational opinion about every individual question and that they give effect to this opinion—in a democracy—by choosing “representatives” who will see to it that that opinion is carried out. Thus the selection of the representatives is made secondary to the primary purpose of the democratic arrangement which is to vest the power of deciding political issues in the electorate. Suppose we reverse the roles of these two elements and make the deciding of issues by the electorate secondary to the election of the men who are to do the deciding. To put it differently, we now take the view that the role of the people is to produce a government, or else an intermediate body which in turn will produce a national executive or government. And we define: the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.*

Dari kutipan di atas dapat dengan jelas dipahami bahwa Schumpeter memandang pemilihan “perwakilan” merupakan tujuan atau agenda utama proses demokrasi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa posisi rakyat hanya penting pada saat pemilu, yaitu sebagai pemilih. Setelah pemilihan usai dan kepemimpinan nasional terbentuk, posisi rakyat tidak lagi penting, dan bahkan lebih banyak menjadi objek.

Tidak jauh berbeda dengan Schumpeter, dalam tulisannya Dahl menempatkan pemilihan sebagai pusat dari sistem demokrasi. Melalui proses pemilihan, rakyat sebagai pemilih dapat menentukan pilihan dari bermacam partai, tokoh dan program, yang dipandanganya terbaik. Peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, sehingga program-program yang dijanjikan dapat dieksekusi (Dahl, 1956/2006: 84). Dari sudut pandang

ini, Dahl memandang kedudukan partisipasi rakyat pada pemilihan umum sangat penting, karena mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan, kebijakan, dan program nasional.

Dari dua pemikiran tentang demokrasi tampak bahwa partisipasi rakyat secara besar-besaran dalam berbagai tahapan proses demokrasi tidak dikehendaki dan bahkan dipandang berbahaya. Berbagai alasan disusun untuk mendukung pandangan itu, seperti isu-isu politik adalah terlalu jauh dari kehidupan keseharian rakyat, sehingga tidak mungkin mereka dapat memahami dan ikut terlibat untuk mengambil kebijakan nasional. Alasan lain adalah bahwa partisipasi massa rakyat akan mendorong naiknya kegiatan politik diantara anggota masyarakat kelas bawah. Menurut Dahl, hal itu akan sangat berbahaya, karena perilaku mereka cenderung otoriter, sehingga dapat menghancurkan berbagai norma yang menjadi sendi-sendi demokrasi, seperti dijelaskannya sebagai berikut:

*The same difficulties apply to the relationship between polyarchy, political activity, and consensus on the basic norms. But here we may encounter an added problem, for current evidence suggests that in the United States the lower one's socioeconomic class, the more authoritarian one's predispositions and the less active politically one is likely to be. Thus if an increase in political activity brings the authoritarian-minded into the political arena, consensus on the basic norms among the politically active certainly must be declining (Dahl, 1956/2006: 89).*

Pemikiran tentang partisipasi berkembang pada dasawarsa-dasawarsa selanjutnya. Pada periode itu partisipasi masyarakat dipandang sebagai tidak hanya untuk melahirkan pemerintahan, yaitu legislatif dan eksekutif. Partisipasi dipahami sebagai salah satu nilai penting dalam demokrasi, sehingga kehadirannya diperlukan. Paling tidak terdapat tiga fungsi partisipasi bagi perkembangan demokrasi, yaitu pendidikan politik, kohesivitas dan progresivitas sosial, serta terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik:

*From these theories on participatory democracy, three functions of participation can be distinguished. The first is the educative function: participation contributes to personal growth in making citizens public citizens... A second function of participatory democracy is the integrative function. Participation contributes to people's feeling that they belong to their community. Finally, participatory democracy ensures good government; as mentioned previously for Rousseau, participation plays an important role in producing and implementing laws and rules that are acceptable to all (Michels, 2006: 326)*

Dari perspektif pendidikan politik, partisipasi dalam berbagai tahapan demokrasi akan melahirkan kesadaran setiap individu sebagai warga negara. Kesadaran itu pada tingkat selanjutnya akan melahirkan perilaku setiap individu anggota masyarakat untuk mengembangkan kebaikan bersama atau yang oleh Mill (1975) disebut sebagai “*public-oriented citizens*”. Arena

belajar demokrasi terbaik, terutama partisipasi, adalah pada level lokal. Partisipasi dapat dilakukan mulai dari tahap pemilihan, perencanaan kebijakan dan program, pelaksanaan sampai pada evaluasi.

Dari perspektif penegakan kohesivitas dan progresivitas sosial, partisipasi dalam setiap tahapan demokrasi akan melahirkan kesadaran bahwa setiap individu adalah saling terkait dan tergantung dengan masyarakatnya. Apabila setiap individu merasa memiliki dan dimiliki masyarakat, maka dalam diri mereka akan tumbuh perilaku untuk menjaga kohesivitas atau kerukunan sosial yang telah tercipta. Di pihak lain, dalam diri mereka juga akan tumbuh perilaku untuk tetap mengembangkan kualitas kehidupan bersama atau progresivitas sosial.

Dari sudut pandang terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*), partisipasi akan melahirkan tuntutan keterbukaan manajemen pemerintahan dan kontrol ketat terhadap setiap tahapan demokrasi. Keterbukaan dan kontrol ketat masyarakat akan sangat membantu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan, korupsi dan berbagai sisi gelap demokrasi lainnya. Di pihak lain, dalam masyarakat juga berkembang kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Dari perspektif hukum, partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik juga sangat penting, terutama dalam ikut memproduksi dan menegakkan hukum yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dari perkembangan pemikiran tentang partisipasi politik dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah sangat penting, tetapi bukan satu-satunya. Partisipasi politik juga perlu dilakukan pasca Pemilu, terutama dalam penentuan kebijakan atau program, eksekusi sampai evaluasi. Pentingnya ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu 2014 juga menjadi kesadaran generasi muda Yogyakarta. Bahkan sebagian besar dari mereka juga ikut melibatkan diri dalam mengontrol pencatatan pemilih.<sup>8</sup>

Fenomena yang menarik dari partisipasi pemilih pemula Yogyakarta adalah rasionalitas pilihan mereka. Pada pemilihan legislatif, sebagian besar dari mereka tidak mempersoalkan gender (87.06%), hubungan darah (79.53%), kesamaan daerah asal (73.88%), dan ikatan agama (66.59%). Bahkan mereka juga tidak mempertimbangkan pilihan orang tua (77.65%), apalagi *money politics* (84.47%). Pilihan mereka terutama didasarkan pada rekam jejak para calon

---

<sup>8</sup> Mengawasi tahapan pencatatan pemilih, sehingga semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014: 64%

legislator (88.71%), dan komitmen untuk menjunjung tinggi bhineka tunggal ika dan menjaga kerukunan masyarakat (90.59%). Pola yang sama juga terjadi pada alasan mereka dalam pemilihan presiden/wakil presiden.

Fenomena itu merupakan perkembangan yang cukup menggembirakan untuk peningkatan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Apabila dilihat dari tingkatan rasionalitas tindakan sosial yang dikembangkan Max Weber, generasi muda Yogyakarta paling tidak telah mampu keluar dari rasionalitas tradisional, yaitu pembenaran tindakan sosial yang didasarkan pada petunjuk dan kebiasaan masa lalu yang diberikan nenek moyang dan berlaku turun temurun, maupun rasionalitas afektif, yaitu pembenaran tindakan sosial yang didasarkan pada aspek emosi atau afeksi. Dalam kadar tertentu, tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai rasionalitas nilai, yaitu pembenaran tindakan sosial yang didasarkan pada nilai yang berkembang dalam komunitas (Ringer, 1997: 106).

Partisipasi dengan dilandasi rasionalitas nilai yang terjadi pada Pemilu 2014 tidak diikuti pada pengawasan kinerja tokoh yang mereka pilih menjadi pemimpin, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Partisipasi Terhadap Hasil Pemilu Legislatif 2014

PERTANYAAN	YA	TIDAK
mengawasi kinerja anggota legislatif 58%	58.12%	41.88%
mempergunjingkan anggota legislatif terpilih yang membuat kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat 44%.	44.00%	56.00%
melakukan aksi protes kepada anggota legislatif terpilih, apabila kebijakan yang dibuat menyimpang dari kepentingan rakyat 40%	40.47%	59.53%
melakukan aksi protes kepada anggota legislatif terpilih, apabila dia tidak peduli terhadap kepentingan rakyat 40%	40.00%	60.00%
mempergunjingkan anggota legislatif terpilih yang melakukan tindakan melanggar hukum 34%	34.35%	65.65%
berjuang secara nyata untuk menurunkan anggota legislatif terpilih, apabila dia melakukan tindakan melanggar hukum 48%	48.24%	51.76%

Dari tabel di atas dapat diambil pemahaman bahwa sebagian besar generasi muda Yogyakarta tidak mau peduli terhadap kebijakan yang diambil oleh para anggota legislatif. Memperbincangkan kebijakan politik yang diambil oleh anggota legislatif pun merupakan hal yang tidak mau dilakukan, apalagi melakukan protes melalui demonstrasi. Bahkan mereka juga tidak mau peduli apabila diantara anggota legislatif terdapat individu yang melakukan pelanggaran hukum.

Realitas itu apabila dikaitkan dengan fenomena politik nasional kontemporer, yaitu perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), akan tidak menjadi menu perbincangan diantara generasi muda Yogyakarta. Merupakan harapan yang terlalu jauh apabila menghendaki mereka tertarik dan terdorong untuk melakukan diskursus kritis terhadap keputusan DPR tentang pilkada oleh dprd yang diwarnai manuver partai Demokrat.

Pola yang sama juga mereka lakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, seperti dapat disimak pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Partisipasi Terhadap Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014

PERTANYAAN	YA	TIDAK
mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden terpilih dalam membuat keputusan di pemerintahan 48.00%	48.00%	52.00%
mempergunjingkan presiden dan wakil presiden terpilih yang membuat kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat 33.88%	33.88%	66.12%
melakukan aksi protes kepada presiden dan wakil presiden terpilih, apabila kebijakan yang dibuat menyimpang dari kepentingan rakyat	40.24%	59.76%
mempergunjingkan presiden dan wakil presiden terpilih, apabila kebijakan yang dibuat mengancam kerukunan masyarakat	33.88%	66.12%
melakukan aksi protes kepada presiden dan wakil presiden terpilih, apabila kebijakan yang dibuat mengancam kerukunan masyarakat	40.24%	59.76%
melakukan aksi protes kepada presiden dan wakil presiden terpilih, apabila mereka tidak peduli terhadap kepentingan rakyat	36.94%	63.06%
mempergunjingkan presiden dan wakil presiden terpilih yang melakukan tindakan melanggar hukum	31.29%	68.71%
berjuang secara nyata untuk menurunkan presiden dan wakil presiden terpilih, apabila mereka melakukan tindakan melanggar hukum	44.71%	55.29%

Meskipun polanya sama, partisipasi politik generasi muda Yogyakarta terhadap presiden/wakil presiden terpilih memiliki keunikan. Secara garis besar, prosentase kepedulian mereka terhadap kebijakan politik eksekutif lebih kecil. Dengan kata lain, ketidakpedulian terhadap eksekutif lebih besar dari pada hal yang sama terhadap legislatif.

Tanpa bermaksud menarik generalisasi terhadap temuan penelitian ini, tetapi fenomena pasifnya partisipasi pemilih pemula Yogyakarta tidak berdiri sendiri. Fenomena yang sama juga ditemui pada masyarakat luas. Pada *Kedaulatan Rakyat* 22 September 2014 diberitakan bahwa 80% masyarakat kota Yogyakarta yang indeks demokrasinya tertinggi, tidak bersedia mempertanyakan atau menagih janji DPR/DPRD:

Ternyata anggota legislatif bisa lenggang kangkung, bahkan dapat melupakan janjinya saat kampanye pada Pemilu Legislatif 2014 lalu. Sebab, 80% warga menyatakan tak pernah menagih janji wakil rakyat yang terpilih. Rakyat 'ogah' mempertanyakan janji-janji mereka saat kampanye.

#### D. Penutup

Dari kajian yang telah dilakukan dengan mengambil generasi muda pemilih pemula sebagai responden tampak bahwa ditinjau dari aspek persaingan yang sehat, Pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa persaingan sehat itu tidak serta merta melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas. Bahkan dikhawatirkan demokrasi di Indonesia terjebak menjadi demokrasi beku. Dari sudut pandang ini, eksplorasi untuk menemukan akar masalah dan sistem seleksi kepemimpinan nasional menjadi usaha yang perlu segera dilakukan.

Ditinjau dari perspektif partisipasi, keterlibatan generasi muda pemilih pemula dalam proses Pemilu 2014 cukup menggembirakan, karena mereka lebih menggunakan rasionalitas nilai dalam menentukan pilihan. Akan tetapi partisipasi politik mereka berhenti hanya pada proses Pemilu dan tidak berlanjut pada hasilnya, dalam arti mengawal dan mengawasi kinerja para pemimpin nasional. Ketidakpedulian generasi muda untuk mengawasi kinerja para pemimpin yang mereka pilih merupakan realitas yang perlu dicari genetika historis dan solusinya.

## DAFTAR ACUAN

- Dahl, Robert, A., 2006, *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mann, Michael, 2005, *The Dark Side of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Markoff, John, 2002, *Wave of Democracy: social movement and political change*. California: Pine Forge Press.
- Martinussen, John, 1997, *Society, state, and market: A guide to competing theories of development*. London: Zed Book.
- Michels, Ank M. B., 2006, "Citizen participation and democracy in the Netherlands". Artikel pada jurnal *Democratization*, Vol.13, No.2, April 2006, pp. 323–339.
- Mill, John Stuart, 1975, *Representative Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Schumpeter, Joseph A., 1976, *Capitalism, Socialism, Democracy*. London: George Allen & Unwin.
- Syamsuddin Haris, 2006, "Demokrasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia". Diterbitkan dalam *Jurnal Penelitian Politik* Volume III No 1 Tahun 2006. ISSN 1829-8001. Jakarta: LIPI
- Ringer, Fritz. (1997). *Weber's Methodology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Republika*, 5 Juli 2012
- Kedaulatan Rakyat* 22 September 2014